



RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)

**T
A
H
U
N**

2025

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BANDA ACEH**

**JLN. .TWK.HASYIM BANTA MUDA NO. 1
BANDA ACEH**

KATA PENGANTAR

Seraya memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, dapat menyelesaikan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025, sebagai penjabaran dari aktivitas selama tahun pelaksanaan pembangunan dan merupakan amanat dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 bahwa Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Kinerja Tahunan, sebagai acuan bagi pelaksanaan kegiatan selama satu tahun.

Rencana Kinerja Tahunan memuat sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2023-2026. Selain dari itu RKT berfungsi sebagai sarana bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh menyampaikan keterangan terhadap rencana program kerja kepada seluruh *stakeholders* dan masyarakat dan juga sebagai acuan dalam penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh tahun 2025.

Akhir kata, semoga dengan adanya dokumen rencana kinerja tahunan ini dapat menjadi rujukan dan pedoman pelaksanaan kegiatan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh sehingga dapat menghasilkan kinerja yang efektif dan efisien.

Banda Aceh, 22 Januari 2025



HERU TRIWIJANARKO, S.STP.M.Si
NIP. 19800104 199810 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. GAMBARAN UMUM	1
1.3. STRUKTUR ORGANISASI	1
1.4. TUJUAN PENYUSUNAN RKT	7
BAB II PERENCANAAN STRATEGIS	8
2.1. VISI DAN MISI	8
2.2. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	9
2.3. INDIKATOR KINERJA	10
2.4. PROGRAM DAN KEGIATAN PADA RENSTRA 2023-2026	11
BAB III PROGRAM KEGIATAN DAN PENETAPAN KINERJA	15
3.1. PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024	15
3.2. PENETAPAN KINERJA	19
BAB IV PENUTUP	22

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Untuk menjamin tercapainya pelaksanaan tugas dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh sesuai dengan yang telah dirumuskan pada Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesbangpol Tahun 2025, maka disusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT). RKT merupakan dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa output dan atau outcome yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi pada satu tahun tertentu. RKT menuntut konsistensi antara pelaksanaan kegiatan dengan proses dan ketentuan dalam Renja dan Renstra sehingga diperlukan kompetensi, profesionalisme, dan disiplin pegawai dilingkungan Kesbangpol Kota Banda Aceh dalam melaksanakan kegiatannya.

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pemdagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, menyatakan bahwa dokumen RKT adalah tolok ukur untuk mencapai akuntabilitas kinerja instansi, pertanggungjawaban pencapaian visi, misi, dan tujuan Kesbangpol Kota Banda Aceh, serta sebagai dasar dalam penetapan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 bagi Kepala Badan Kesbangpol kepada Walikota.

Secara garis besar Rencana Kerja Tahunan (RKT) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh tahun 2025 memuat target dari indikator kinerja pada tingkat sasaran yang didukung melalui pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran tahun 2025.

1.2. GAMBARAN UMUM

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh dibentuk berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh, adalah merupakan unsur staf Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas umum pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Wilayah Kota Banda Aceh.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program Badan;
- b. Perumusan Kebijakan teknis dan Pembinaan urusan Bina Ideologi, wawasan kebangsaan, karakter bangsa, politik dalam negeri, ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama, organisasi kemasyarakatan, penanganan konflik dan kewaspadaan nasional;
- c. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan urusan bina ideologi, wawasan kebangsaan, karakter bangsa, politik dalam negeri, ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama, organisasi kemasyarakatan, penanganan konflik dan kewaspadaan nasional;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang bina ideologi, wawasan kebangsaan, karakter bangsa, politik dalam negeri, ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama, organisasi kemasyarakatan, penanganan konflik dan kewaspadaan nasional;
- e. Penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan;
- f. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Badan; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsi Badan.

1.3. STRUKTUR ORGANISASI

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh, adalah unsur staf, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota. Sesuai dengan maksud Qanun Nomor 11 Tahun 2016, yang melaksanakan tugas umum pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Wilayah Kota Banda Aceh :

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Walikota Banda Aceh melalui Sekretaris Daerah Kota sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Sedangkan Sub bagian dipimpin oleh seorang Kasub bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Badan.

Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Sub bidang yang sekarang diduduki jabatan Fungsional penyetaraan dipimpin oleh seorang Kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Dalam struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berada pada jenjang eselonering II.b, yang susunan organisasinya terdiri dari 1 (satu) Kepala Badan (eselon II.b), 1 (satu) Sekretaris Badan (eselon III.a), 4 (empat) Kepala Bidang (eselon III.b), 1 (satu) Ka Subbag (eselon IV.a) dan 10 (sepuluh) orang jabatan Fungsional, yaitu :

- a. Sekretaris Badan
- b. Sub Bagian :
 1. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset
 2. Jabatan Fungsional
 - Perencanaan Ahli Muda
 - Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda
- c. Bidang
 1. Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa
 2. Bidang Politik Dalam Negeri
 3. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Organisasi Masyarakat
 4. Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional

Masing-masing bidang dibantu oleh 2 (dua) orang Analisis Kebijakan Ahli Muda yang bertanggungjawab kepada masing-masing Kepala Bidang dan Sekretaris.

Adapun deskripsi kondisi umum pelayanan di Sekretariat Badan dan masing-masing Bidang dalam lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.

a. Sekretariat Badan

Pada Bagian Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh terdapat 3 (sebelas) pegawai pada saat ini, yang terdiri dari, 1 (satu) orang Kepala Subbagian yaitu Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset, 2 (dua) orang Jabatan Fungsional yaitu 1 (satu) orang Perencana Ahli Muda dan 1 (satu) orang Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli muda. Jabatan fungsional umum berjumlah 6 (Enam) orang dan 1 (satu) orang Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan yang terdiri dari, serta dibantu 4 (empat) orang tenaga Non PNS.

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam pengelolaan urusan administrasi, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan tata laksana, kearsipan, umum, perlengkapan dan peralatan, kerumahtanggaan, hukum, penyelenggaraan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

b. Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa

Pada Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa terdapat 5 (lima) pegawai yang terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Bidang dan 2 (dua) Analis Kebijakan Ahli Muda serta Jabatan fungsional umum berjumlah 1 (satu) orang dari golongan III dan 1 orang tenaga Non PNS.

Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan Bidang Urusan Pemerintahan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dibidang Bina Ideologi, Wawasan

c. Bidang Politik Dalam Negeri

Pada Bidang Politik Dalam Negeri terdapat 5 (lima) orang pegawai terdiri atas 1 (satu) orang Kepala Bidang, 2 (dua) Subbidang yang di jabat oleh Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda Pengembangan Budaya dan dan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda Etika Politik dan Analis Kebijakan Ahlimuda Fasilitasi Partai Politik dan Pemilu. Jabatan fungsional umum berjumlah 2 (satu) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang golongan IV dan 1 (satu) orang golongan III

Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan Bidang Urusan Pemerintahan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dibidang Politik Dalam Negeri.

d. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan

Pada Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan terdapat 3 (tiga) pegawai terdiri atas 1 (satu) orang Kepala Bidang, 2 (dua) Subbidang yang dijabat oleh Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda Organisasi Kemasyarakatan serta dibantu oleh 1 (satu) orang Pengolah data dan 1 (satu) orang tenaga Non PNS.

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan Bidang Urusan Pemerintahan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dibidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, dan Organisasi Kemasyarakatan

e. Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional

Pada Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional terdapat 4 (empat) pegawai terdiri atas 1 (satu) orang Kepala Bidang, 2 (dua) Subbidang yaitu yang dijabat oleh Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda Penanganan Konflik dan Jabatan Fungsional Kebijakan Ahli Muda

Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategis. Serta dibantu oleh seorang Analis Keamanan berjumlah 1 (satu) orang dari golongan IV dan 1 Orang tenaga Non PNS.

Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan Bidang Urusan Pemerintahan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dibidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional

Perincian jumlah jenjang jabatan dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh adalah sebagaimana terekam dalam tabel berikut ini:

TABEL 1.1
PERINCIAN JUMLAH JABATAN STRUKTURAL

No	Jabatan	Eselon						Total
		I.b	II.a	II.b	III.a	III.b	IV.a	
1.	Kepala Badan	-	-	1	-	-	-	1
2.	Sekretaris	-	-	-	1	-	-	1
3.	Kepala Bidang	-	-	-	-	4	-	4
4.	Sub Bagian	-	-	-	-	-	1	1
Total		-	-	1	1	4	1	7

Data Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset.

Perincian jumlah pegawai dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh Kota Banda Aceh, baik pemangku jabatan struktural maupun staf diperinci menurut Bagian dan jenis kelamin sebagaimana tersebut dalam tabel berikut :

TABEL 1.2
PERINCIAN JUMLAH PEGAWAI MENURUT JENIS KELAMIN

No	Jabatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5
1	Kepala Badan	1	-	1
2	Sekretaris	-	1	1
3	Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	3	2	5
4	Bidang Politik Dalam Negeri	3	2	5
5	Bidang Ketahanan Ekonomi, sosial, budaya dan organisasi kemasyarakatan	4	1	5
6	Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional	4	1	5
7	Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset	2	4	6
8	Jabatan Fungsional Perencana ahli Muda	-	1	1
9	Analisis Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan		1	1
10	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	2	3	5
11				
	TOTAL	19	16	35

Dalam rangka meningkatkan integritas dan kualitas aparatur dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh pada dasarnya tidak terlepas dari tingkat kemampuan untuk memahami konsep teknis analisis manajemen yang implikasinya dilakukan penjabaran kedalam penyelesaian tugas-tugas tertentu.

Untuk menunjang tugas-tugas di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh agar dapat melaksanakan pelayanan prima diperlukan langkah-langkah antara lain:

- Perlu memaksimalkan pendidikan diklat teknis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
- Perlu mengupayakan peningkatan sarana dan prasarana guna memperlancar tugas-tugas

- Perlu penempatan pegawai sesuai kebutuhan
- Perlu upaya yang serius terhadap pembenahan manajemen kepegawaian
- Perlu meningkatkan tunjangan prestasi kerja berdasarkan produk/ hasil yang dilakukan sehingga mendorong aparatur dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas pekerjaan.

1.4. TUJUAN PENYUSUNAN RKT

Dalam upaya mewujudkan pembangunan Kota Banda Aceh yang lebih prioritas, terarah, merata, serta berkeadilan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh menyusun Rencana Kinerja Tahunan tahun 2024 yang menggambarkan visi, misi, tujuan, strategi, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh Tahun 2024.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan rangkaian tindakan dan rangkaian mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh dalam rangka pencapaian tujuan. Rencana Kinerja Tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh disusun dengan maksud untuk memberikan pedoman bagi perangkat kerja yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2024.

Tujuan Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh adalah:

1. Merumuskan Program dan Kegiatan guna mendukung pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.
2. Menguraikan secara strategis tahapan target yang akan dicapai melalui indikator input, output dan outcome dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan.
3. Mengarahkan strategi penyelenggaraan pembangunan sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh 2023 – 2026.
4. Menjadi acuan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan pada tahun 2024.
5. Sebagai Tolak ukur keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh penyusunan LKJIP Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kota Banda Aceh tahun 2024.

BAB II

PERENCANAAN STRATEGIS

2.1. VISI DAN MISI

Reformasi Birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik merupakan isu sentral dalam perencanaan strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, hal ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, melaksanakan tugas umum pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Wilayah Kota Banda Aceh

Selaku unsur staf, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota., Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berperan dalam membangun dan mensinergiskan kesatuan arah pandangan dan mekanisme gerak tujuan SKPD. Semakin tingginya tuntutan dan kebutuhan masyarakat atas bentuk dan kualitas pelayanan, perlu diakomodasikan dalam bentuk respon positif, melalui pengaturan, pengendalian, dan pengkoordinasian kebijakan daerah secara tepat dan cepat.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh tahun 2023-2026, disusun berdasarkan hasil analisis terhadap kondisi kekinian Kota Banda Aceh. Sehubungan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, disamping didasari pada hasil kajian terhadap kemajuan-kemajuan yang dicapai serta kendala-kendala yang belum tertangani dalam priode pembangunan sebelumnya.

Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026 merupakan pedoman pelaksanaan kinerja bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh. Penyusunan Renstra berpedomani pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026.

Penyusunan rencana strategis ini disusun untuk menjabarkan lebih lanjut visi dan misi Kota Banda Aceh ke dalam visi dan misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan fungsi sebagai service staff maupun dalam fungsi auxiliary staff dan dijadikan acuan lebih lanjut untuk dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.

Penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh dimaksudkan Yaitu;

1. Untuk memberikan arahan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai oleh APBK dan sumber-sumber lainnya.
2. Menyediakan suatu tolok ukur bagi evaluasi dan penilaian kinerja.

Adapun tujuan penyusunannya adalah :

1. Menguraikan agenda pembangunan serta mengintegrasikannya ke dalam Visi dan Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.

2. Menguraikan secara strategis tahapan target yang akan dicapai dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan, berdasarkan isu-isu aktual/strategis yang dihadapi.
3. Menjadi pedoman bagi unit-unit dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh dalam menyusun program dan kegiatan tahunan secara terpadu, terarah dan terukur.
4. Menjadi acuan penilaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan dalam kurun waktu empat tahun.

Adapun misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kinerja aparatur yang Profesional
2. Meningkatkan pemahaman terhadap ideologi Pancasila, wawasan Kebangsaan, Rasa kesadaran Bela Negara dan cinta tanah air untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. Meningkatkan pemahaman budaya politik yang demokratis dan membangun kemitraan kelembagaan politik yang harmonis
4. Meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan serta penanganan konflik yang memberikan dampak terhadap persatuan dan kesatuan bangsa
5. Memelihara sinergitas dan harmonisasi koordinasi dibidang intelijen daerah terhadap kerawanan sosial serta perlintasan dan pergerakan orang asing, tenaga kerja asing dan ormas asing.
6. Mewujudkan peran lembaga penggerak keagamaan dan lembaga penggerak kemasyarakatan lainnya dibidang kesatuan bangsa dan politik

2.2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

2.2.1. Tujuan

Tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh dalam pembangunan Kesatuan Bangsa dan Politik jangka empat (4) tahun kedepan adalah:

1. Mewujudkan keamanan dan kenyamanan, wawasan kebangsaan, sosial, budaya serta stabilitas politik di Kota Banda Aceh;
2. Meningkatkan Kualitas Demokrasi dan
3. Meningkatkan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pembangunan.

Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh dalam jangka empat (4) tahun kedepan adalah :

1. Meningkatnya Efektifitas Pencegahan konflik sosial dan kewaspadaan nasional didaerah;
2. Meningkatnya Kualitas Demokrasi dan
3. Meningkatnya Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pembangunan.

2.2.3. Strategi

Strategi adalah cara yang ditempuh dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana SKPD menciptakan nilai tambah bagi *stakeholder* layanan. Adapun strategi yang ditempuh yaitu :

1. Meningkatkan kapasitas aparatur melalui keikutsertaan dalam diklat teknis, diklat kepemimpinan, dan diklat fungsional.
2. Membangun koordinasi dan kerjasama lintas SKPD, lintas Pemerintahan dan lintas stakeholders lainnya.
3. Membangun kedamaian dan ketentraman dalam masyarakat.
4. Melaksanakan pembinaan masyarakat yang berwawasan kebangsaan, kesadaran berpolitik, ketertiban dan keamanan lingkungan menuju Banda Aceh Gemilang dalam bingkai syariah.
5. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap semua kegiatan.

2.2.4. Kebijakan

Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil dan digunakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan, atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan dan sasaran, tujuan serta pencapaian visi dan misi SKPD. Kebijakan dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Arah kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2023-2026:

Memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dibidang kesatuan bangsa dan politik.

2.3 Indikator Kinerja

Untuk mengukur capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam kerangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dan target kinerja yang harus dicapai, dijelaskan dalam tabel berikut :

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja
1	2	3	4
1	Tujuan Mewujudkan Keamanan dan Kenyamanan, wawasan kebangsaan, sosial, budaya serta syabilitas politik di Kota Banda Aceh	Indeks Ketentraman Umum	74.64
2	Sasaran Terwujudnya Keamanan dan Kenyamanan, wawasan kebangsaan, sosial, budaya serta syabilitas politik di Kota Banda Aceh	Capaian Tingkat Penanganan Konflik Sosial	100%
		Persentase Tingkat Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pilkada	73.79%
		Persentase Ormas, OKP, dan LSM yang Aktif	50.13%

2.4. Program dan Kegiatan pada Renstra 2023-2026

Program adalah instrumen kegiatan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu atau beberapa unit kerja sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan serta dalam rangka mencapai suatu tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hal ini menjadi acuan bagi unit kerja dalam menyusun rencana strategis dalam kurun waktu 4 (empat) tahun ke depan.

Dengan diberlakukannya Keputusan Menteri dalam Negei Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 Tentang hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah maka ada nya perubahan pada kode rekening belanja yang berlaku serta indikator dan satuan target capaian Program, Kegiatan dan subkegiatan.

Adapun program-program yang telah ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk dijabarkan dalam rencana kerja setiap tahunnya dalam bentuk berbagai kegiatan yang terukur dari pembiayaan APBK, meliputi:

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

➤ *Kegiatan :* *Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*

Sub Kegiatan :

❖ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

- *Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*

Sub Kegiatan :

- ❖ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- ❖ Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

- *Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah*

Sub Kegiatan :

- ❖ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
- ❖ Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- ❖ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- *Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*

Sub Kegiatan :

- ❖ Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA & Listrik
- ❖ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- *Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*

Sub Kegiatan :

- ❖ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- ❖ Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

- *Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan*

Sub Kegiatan :

- ❖ Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, BVELa Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

2. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

- *Kegiatan : Perumusan Kebijakan teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, fasilitasi*

Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik.

Sub Kegiatan :

- ❖ Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah
- ❖ Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah
- ❖ Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah

3. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

- *Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya*

Sub kegiatan :

- ❖ Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan ekonomi, Sosial, Budaya dan fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan narkoba, fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan di daerah

4. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial

- *Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan nasional dan Penanganan Konflik Sosial*

Sub Kegiatan :

- ❖ Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan

Perbatasan Antar Negara, fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.

- ❖ Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
- ❖ Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota

BAB III

PROGRAM, KEGIATAN DAN PENETAPAN KINERJA

3.1 Program dan Kegiatan Tahun 2024

Rencana program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh Tahun 2024 merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam renstra. Rencana Kinerja Tahun 2024 ditetapkan pada awal tahun 2024, memuat Program, Kegiatan serta target kinerja atas seluruh indikator hasil pada tingkat kegiatan. Rencana Kinerja Tahunan 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh sebagai berikut :

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			Persentase Pemenuhan kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah
		<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>		<i>Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi OPD yang Tersusun</i>
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>		<i>Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
		<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>		<i>Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR
		<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>		<i>Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik yang Disediakan
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan
		<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>		<i>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
2	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN			PERSENTASE MENINGKATNYA KESADARAN BERBANGSA, BERNEGARA DAN CINTA TANAH AIR
		<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</i>		<i>Persentase pelaksanaan kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa</i>
			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR
3	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK			PERSENTASE PELAKSANAAN PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		Persentase Pelaksanaan kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik.
			Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah
			Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah
			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR
4	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA			PERSENTASE PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		Persentase Pelaksanaan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
5	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL			PERSENTASE TERLAKSANANYA PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		Persentase Pelaksanaan Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah.
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan.	Jumlah laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan.
			Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota.	Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota.

3.2 Penetapan kinerja

Keseluruhan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh tahun 2024 yang ditetapkan dalam mendukung pencapaian target indikator sasaran Renstra tertuang dalam Dokumen Penetapan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh tahun 2024 yang diperjanjikan antara Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh dan Walikota Banda Aceh pada tanggal 25 Januari 2024, sebagai berikut :

Sasaran Strategis :

Sasaran	No	Indikator Kinerja	
		Uraian	Target
Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Pelaporan, dan Penatausahaan Aset	1	Persentase Dokumen Perencanaan	100 %
	2	Penganggaran Badan Kesbangpol Yang Dilaporkan Tepat Waktu	100 %
	3	Persentase Tingkat Kedisiplinan Pegawai Pada Badan Kesbangpol	98 %
	4	Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	75 %

Sasaran Strategis 1 :

Sasaran	No	Indikator Kinerja	
		Uraian	Target
Capaian Tingkat Penanganan Konflik Sosial	1.	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	100 Orang
	2.	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	100 Orang
	3.	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100 Orang
	4.	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100 Orang
	5.	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	2 Laporan
	6.	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	100 Orang
	7.	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	100 Orang
	8.	Jumlah Laporan Hasil Monitoring di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	2 laporan
	9.	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	2 laporan

Sasaran Strategis 2 :

Sasaran	No	Indikator Kinerja	
		Uraian	Target
Persentase Tingkat Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu Dan Pilkada		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	100 Orang
		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	100 Orang
		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2 Laporan

Sasaran Strategis 3 :

Sasaran	No	Indikator Kinerja	
		Uraian	Target
Persentase Ormas, OKP, Dan LSM Yang Aktif		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	100 Orang
		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	2 Laporan

Jumlah keseluruhan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh tahun 2024 sebesar Rp. 30.187.280.878,- (*Tiga Puluh Milyar Seratus Delapan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah*).

BAB IV PENUTUP

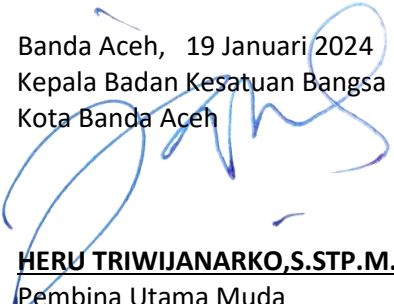
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh Tahun 2024 merupakan instrumen awal dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh . Dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh memperhatikan skala prioritas serta diupayakan semaksimal mungkin dapat memenuhi azas keadilan, pemerataan dan keseimbangan. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh pada Tahun 2024 dalam melaksanakan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam suatu Rencana Strategik (Renstra) telah berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi melalui kegiatan, program dan kebijaksanaan yang ditetapkan walaupun dengan segala keterbatasan yang ada.

Berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh yang ditetapkan pada tahun 2024 terdapat 5 program, 11 Kegiatan dan 18 Sub kegiatan. Diharapkan seluruh program dan kegiatan tersebut dapat direalisasikan secara optimal sesuai sasaran yang telah ditetapkan. Kendala yang mungkin mengakibatkan pencapaian sasaran tidak optimal seperti masalah aparatur masih ada yang belum memahami tugas pokok, fungsi serta kewenangan yang dimilikinya, kurangnya sumber daya terutama sumber daya manusia yang berkualitas dan alokasi anggaran yang minim. Selain itu Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh tahun 2024 merupakan tahun kedua dari Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh 2023-2026.

Semoga dengan adanya penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2024 ini dapat menjadi acuan dalam pencapaian sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh sesuai dengan Visi dan Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dapat dijadikan tolak ukur sampai sejauh mana tingkat keberhasilan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh dalam melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2024.

Banda Aceh, 19 Januari 2024
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Banda Aceh


HERU TRIWIJANARKO,S.STP.M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19800104 199810 1 001

